

MODEL ISLAMISASI EKONOMI: STUDI KASUS SAREKAT DAGANG ISLAM

Muh Fajar Pramono¹

ABSTRAK

Islamisasi pengetahuan merupakan isu yang tidak bisa dilewatkan begitu saja dan telah lama diperbincangkan, termasuk di Indonesia. Banyak kalangan yang mencoba mengusung gagasan ini dan banyak pula yang mengkritiknya, namun tidak banyak yang memahaminya secara konseptual dalam konteks pandangan hidup dan peradaban Islam. Islamisasi Indonesia dalam bidang ekonomi masih sangat sedikit. Berbeda dengan Islamisasi dalam bidang lain seperti pendidikan, pemurnian aqidah, da'wah parlemen, perbaikan fiqh ibdah dan lainnya. Islamisasi dalam bidang ekonomi baru sekadar riak-riak kecil yang belum begitu populer muncul ke permukaan. Itupun baru dalam tataran ekonomi makro seperti bermunculannya perbankan syariah, asuransi syariah dan sejenisnya, padahal tentunya tidak hanya sebatas itu. Sementara itu, sebagsyang lain menganggap bahwa perkembangan studi ekonomi Islam tidak lain hanyalah sebagai reaksi sesaat dalam merespon modernisme. Maka dalam kesempatan ini menarik dikaji model Islamisasi ekonomi dalam kasus Sarekat Dagang Islam (SDI). Metode yang digunakan dalam studi ini dengan menggunakan metode eksploratif. Hasil studi diketahui bahwa kekuatan Sarekat Dagang Islam (SDI) tidak hanya dalam kekuatan doktrin dan konsep, tetapi yang sama penting adalah kemampuan membaca kebutuhan dan problem yang dihadapi oleh umat dalam ekonomi waktu itu. Jadi, keberadaan Sarekat Dagang Islam tidak hanya mampu menggerakkan ulama dan ilmuwan serta para elit Jawa, tetapi juga mampu menggerakkan umat dalam gerakan ekonomi.

¹ Dosen Universitas Darussalam (UNDIA) Gontor, mframono@undia.gontor.ac.id

Kata Kunci : Model, Islamisasi, Ekonomi, Studi Kasus, Sarekat Dagang Islam

A. Pendahuluan

Islamisasi pengetahuan merupakan isu yang tidak bisa dilewatkan begitu saja dan telah lama diperbincangkan, termasuk di Indonesia. Islamisasi dalam bidang ekonomi masih sangat sedikit. Berbeda dengan Islamisasi dalam bidang lain seperti pendidikan, pemurnian aqidah, da'wah parlemen, perbaikan fiqh ibadah dan lainnya. Islamisasi dalam bidang ekonomi baru sekedar riak-riak kecil yang belum begitu populer muncul ke permukaan. Itupun baru dalam tataran ekonomi makro seperti bermunculannya perbankan syari'ah, asuransi syari'ah dan sejenisnya, padahal tentunya tidak hanya sebatas itu (Chapra, 2000). Padahal, dahulu awal perjuangan da'wah Rasulullah SAW dibarengi dengan meningkatnya kekuatan ekonomi umat. Bergabungnya para saudagar yang kuat dalam bidang ekonomi seperti 'Utsman bin 'Affan, 'Abdurrahman bin 'Auf, Abu Bakar, Umar bin Khattab dan yang lainnya menjadikan perjuangan Rasulullah SAW semakin cepat pergerakannya. Hingga Islam dapat masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan pula.

Menurut penulis ada tiga pendekatan dalam studi agama. Pertama, adalah pendekatan mencari kebenaran agama, sebagaimana yang dilakukan oleh prodi perbandingan mazhab, ilmu Al Qur'an dan Tafsir. Pemahaman terhadap problem umat juga penting untuk studi ini, tetapi jauh lebih penting adalah penguasaan doktrin dan teks-teks agama yang terpercaya.

Kedua, adalah studi implementasi kebenaran agama dalam realitas. Studi ini tidak mengugut atau mempertanyakan kebenaran agama. Tetapi studi ini lebih difokuskan pada implementasi kebenaran agama dalam realitas, misalnya, keadilan itu sebagai suatu kebenaran, bagaimana diimplementasikan dalam

masyarakat. Di satu sisi bahwa kondisi dan tingkatan masyarakat berbeda-beda dalam pemahaman kebenaran agama maupun perbedaan kualitas SDM-nya, dalam arti tingkat berpikir, juga perbedaan dalam budaya dan tingkat kesulitan hidup. Maka yang sama penting disamping penguasaan doktrin dan konsep, yang sama penting adalah penguasaan konteks (kondisi subyektif masyarakat saat tersebut).

Ketiga, adalah studi yang mempelajari sikap dan perilaku agama. Studi ini tidak terlalu menfokuskan kepada teks-teks agama, tetapi lebih difokuskan pada sikap perilaku seseorang terhadap agama, sebagaimana dalam studi psikologi agama, sosiologi agama dan antropologi agama.

Terkait dengan tema tulisan ini, yaitu **Model Islamisasi Ekonomi - Studi kasus Sarekat Dagang Islam** lebih tepat masuk dalam kategori yang kedua, yaitu: studi implementasi kebenaran agama dalam realitas. Studi ini tidak hanya mencoba melakukan eksplorasi terhadap doktrin dan konsep-konsep yang dikembangkan, tetapi juga akan melakukan eksplorasi terhadap problem yang dihadapi umat saat itu (seputar tahun 1900-an). Sehingga dengan studi ini diharapkan mendapatkan suatu jawaban kenapa keberadaan Sarekat Dagang Islam (1905) tidak hanya mampu menggerakkan ulama, ilmunan dan elit, tetapi juga secara bersama-sama juga bisa menggerakkan masyarakat dalam gerakan ekonomi waktu itu.

B. Pembahasan

1. Model Islamisasi Ekonomi Dalam Sarekat Dagang Islam

Sarekat Dagang Islam (disingkat SDI) didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 di Surakarta oleh Haji Samanhudi². Nama kecilnya ialah Sudarno Nadi. Pondok Pesantren yang

2. Pendiri Sarekat Islam. Haji Samanhudi adalah seorang pengusaha batik di Kampung Lawan (Solo) yang mempunyai banyak pekerja, sedangkan pengusaha batik lainnya adalah orang-orang Cina dan Arab.

pernah ia menimba ilmu didalamnya antara lain, yaitu : Pontren KM Sayuthy (Ciawigebang), Pontren KH Abdur Rozak (Cipancur), paman ia, Pontren Sarajaya (Kab Cirebon), Pontren (di Kab Tegal, Jateng), Pontren Ciwaringin (Kab Cirebon) dan Pontren KH Zaenal Musthofa (Tasikmalaya) (Korver, 1985).

Dalam dunia perdagangan, Samanhudi merasakan perbedaan perlakuan oleh penguasa Hindia Belanda antara pedagang pribumi yang mayoritas beragama Islam dengan pedagang Tionghoa pada tahun 1905. Oleh sebab itu Samanhudi merasa pedagang pribumi harus mempunyai organisasi sendiri untuk membela kepentingan mereka. Pada tahun 1905, ia mendirikan Sarekat Dagang Islam untuk mewujudkan cita-citanya.

SDI merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia, pada awalnya organisasi yang dibentuk oleh Haji Samanhudi ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang masuknya pedagang asing untuk menguasai ekonomi rakyat pada masa itu dengan tujuan awal untuk menghimpun para pedagang pribumi Muslim (khususnya pedagang batik) agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar Tionghoa.

Pada mulanya Sarekat Islam lahir karena adanya dorongan dari R.M. Tirtoadisuryo seorang bangsawan, wartawan, dan pedagang dari Solo. Tahun 1909, ia mendirikan perkumpulan dagang yang bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). Perkumpulan itu bertujuan untuk memberikan bantuan pada para pedagang pribumi agar dapat bersaing dengan pedagang Cina. Kegelisahan Tirtoadisuryo itu diutarakan pada H. Samanhudi. Atas dorongan itu H. Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam di Solo (1911). Pada mulanya SI bertujuan untuk kesejahteraan sosial dan persamaan sosial. Mula-mula SI merupakan gerakan sosial ekonomi tanpa menghiraukan masalah kolonialisme.

Jelaslah bahwa tujuan utama SDI adalah melindungi kegiatan ekonomi pedagang Islam agar dapat terus bersaing dengan pengusaha Cina. Agama Islam digunakan sebagai faktor pengikat dan penyatu kekuatan pedagang Islam yang saat itu juga mendapat tekanan dan kurang diperhatikan dari pemerintah kolonial.

Pada saat itu, pedagang-pedagang keturunan Tionghoa tersebut telah lebih maju usahanya dan memiliki hak dan status yang lebih tinggi dari pada penduduk Hindia Belanda lainnya. Kebijakan yang sengaja diciptakan oleh pemerintah Hindia-Belanda yang cenderung menguntungkan kelompok Cina dan kemudian menimbulkan perubahan sosial karena timbulnya kesadaran di antara kaum pribumi yang biasa disebut sebagai *Inlanders*. SDI merupakan organisasi ekonomi yang berdasarkan pada agama Islam dan perekonomian rakyat sebagai dasar penggerakannya. Di bawah pimpinan H. Samanhudi, perkumpulan ini berkembang pesat hingga menjadi perkumpulan yang berpengaruh.

Cina memegang monopoli perdagangan hampir dalam segala sektor, keadaan demikian terjadi karena golongan Cina sendiri oleh pemerintahan Belanda diberikan hak-hak istimewa dan diperlakukan istimewa sebagai *kula* negara Belanda yang dinamakan *Vreem de Oosterlingen* sementara penduduk pribumi berada pada kelas ketiga (rendah) yang disebut sebagai "*inlanders*".

Kebangkitan Sarekat Dagang Islam merupakan lambang awal dari suatu keberhasilan gerakan pembaharuan sistem organisasi Islam. Hal ini karena suatu pembaharuan atau reformasi memerlukan ketangguhan organisasi dan kontinuitas perolehan dana. Di bawah pimpinan H. Samanhudi, perkumpulan ini berkembang pesat hingga menjadi perkumpulan yang berpengaruh.

R.M. Tirtoadisuryo pada tahun 1909 mendirikan Sarekat Dagang Islamiyah di Batavia.³ Pada tahun 1910, Tirtoadisuryo
R.M. Tirtoadisuryo seorang bangsawan, wartawan, dan pedagang dari

mendirikan lagi organisasi semacam itu di Buitenzorg. Demikian pula, di Surabaya H.O.S. Tjokroaminoto mendirikan organisasi serupa tahun 1912. Tjokroaminoto masuk SI bersama Hasan Ali Surati, seorang keturunan India, yang kelak kemudian memegang keuangan surat kabar SI, *Detusan Hindia*. Tjokroaminoto kemudian dipilih menjadi pemimpin, dan mengubah nama SDI menjadi Sarekat Islam (SI).

Pada tahun 1912, oleh pimpinannya yang haru Haji Oemar Said Tjokroaminoto, nama SDI diubah menjadi Sarekat Islam (SI). Hal ini dilakukan agar organisasi tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tapi juga dalam bidang lain seperti politik. Jika ditinjau dari anggaran dasarnya, dapat disimpulkan tujuan SI adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan jiwa dagang.
- a. Membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha.
- a. Memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat.
- a. Memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam.
- a. Hidup menurut perintah agama.

Disisi lain kebijakan pemerintah kolonial Belanda dengan landasan imperialisme modernnya, dalam penguasaan Nusantara Indonesia melibatkan pemilik modal asing. Nusantara Indonesia dijadikan sumber bahan mentah dan pasar industri penjajah Barat. Jika demikian realitas tantangan yang dihadapi oleh ulama, tindakan apa dan bagaimana seharusnya yang dilakukan dalam menjawab tantangan imperialisme modern?

Kondisi yang serba sulit ini tidak membuat para pedagang pribumi muslim menjadi lemah. Sebaliknya, malah menumbuhkan kesadaran bahwa mereka harus mengumpulkan kekuatan demi tegaknya keadilan di bumi

Solu. Saat itu perdagangan batik mulai dari bahan baku dikuasai oleh pedagang Cina, sehingga pedagang batik pribumi semakin terdesak.

pertiwi. Organisasi ini mendapat simpati dari rakyat Indonesia karna sifatnya yang selalu berpihak kepada pribumi. Berbeda dengan organisasi Boedi Oetomo (BO) yang didirikan 3 tahun kemudian, organisasi eksklusif yang anggotanya hanya dari kalangan pegawai negeri yang setia terhadap pemerintahan kolonial Belanda dan tujuannya hanya untuk kepentingan golongan yang sempit

Seperti yang dikatakan oleh KH Firdaus AN, mantan Ketua Majelis Syuro Sarekat Islam "Tidak pernah sekalipun BO membahas tentang kesadaran berbangsa dan bernegara yang merdeka. Mereka ini hanya membahas bagaimana memperbaiki taraf hidup orang-orang Jawa dan Madura di bawah pemerintahan Ratu Belanda."

Selanjutnya pada tahun 1912 berkat keadaan politik dan sosial pada masa tersebut HOS Tjokroaminoto⁴ menggagas SDI untuk mengubah nama dan bernetamorfosis menjadi organisasi pergerakan yang hingga sekarang disebut Sarikat Ialam (akte Notaris pada tanggal 10 September 1912).

Dahulu pun, perjuangan da'wah Rasulullah Saw dibarengi dengan meningkatnya kekuatan ekonomi umat. Bergabungnya para saudagar yang kuat dalam bidang ekonomi seperti 'Utsman bin 'Affan, 'Abdurrahman bin 'Auf, Abu Bakar, Umar bin Khattab dan yang lainnya menjadikan perjuangan Rasulullah semakin cepat pergerakannya, sebagaimana yang tersebut di atas. Hingga Islam dapat masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan pula.

Oleh karena itu, agenda besar kita sekarang adalah menerapkan model perjuangan Sarekat Dagang Islam tahun

⁴ Lahir di Tegalar, Ponorogo, Jawa Timur, 16 Agustus 1882 meninggal di Yogyakarta, Indonesia, 17 Desember 1934 pada umur 52 tahun, atau yang lebih dikenal dengan nama H.O.S Cokroaminoto. Salah satu trilogi darinya yang termasyhur adalah *Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni taubid, sepintar-pintar siasat*. Ini menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya yang memerlukan tiga kemampuan pada seorang pejuang kemerdekaan.

1905 ke dalam perjuangan Islam Indonesia saat ini. Dan juga terus menyempurnakan ekonomi Islam makro pada tataran nasional dan menggalakkan ekonomi Islam pada tataran yang paling kecil yaitu rumah tangga.

2. Analisis Doktrin dan Konsep Ekonomi

Berdasarkan uraian di atas bahwa kehadiran Sarekat Dagang Islam (1905) dan kemudian perkembangan berubah menjadi Sarekat Islam (1912) diketahui mempunyai tujuan: 1) Mengembangkan jiwa dagang, 2) Membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha, 3) Memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat, 4) Memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam, 5) Hidup menurut perintah agama.

Sebagaimana yang disebut di atas, bahwa salah satu konsep dalam ekonomi SDI/ SI adalah kemandirian. Konsep ini adalah Islam suatu yang harus ditanamkan sejak dini. Kemandirian merupakan masalah yang amat urgen, terutama bagi seorang laki-laki yang sudah baligh. Untuk memenuhi kebutuhannya, seorang muslim wajib berusaha dengan mencari nafkah yang halal. Dengan nafkah itu, ia dapat menghidupi dirinya dan keluarganya.

Konsep yang lain yang cukup menonjol dari tujuan SDI/ SI adalah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang umumnya berada dalam taraf kemiskinan dan kemelaratan. Allah dan RasulNya menganjurkan umat Islam untuk berusaha dan bekerja. Apapun jenis pekerjaan itu selama halal, maka tidaklah tercela. Para nabi dan rasul juga bekerja dan berusaha untuk menghidupi diri dan keluarganya.

Sebagaimana yang dijarkan oleh Rasulullah SAW:

Dari Umar Radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Kalau kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakkal, maka niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung; ia pergi pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, lalu pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang" (HR. Tirmidzi, No. 2344; Ahmad (1/30); Ibnu Majah, No. 4164).

Hadist yang lain:

Dari Abi Abdillah (Zubair) bin Awwam Radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya, seorang di antara kalian membawa tali-talinya dan pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya, adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberi atau tidak" (HR. Bukhari, No. 1471)

Allah berfirman:

"Maka apabila shalat telah selesai dikerjakan, bertebaranlah kamu sekalian di muka bumi dan carilah rezeki karunia Allah" (QS. Al Jumu'ah : 10)

Pelajaran beberapa dalil di atas : 1). Bekerja atau berusaha jenis apapun asal jalan yang ditempuh halal, adalah baik dan terhormat. 2). Hidup dengan menggantungkan diri kepada orang lain adalah tercela. 3). Malas merupakan sifat yang tercela. 4). Makan dari hasil jerih payah sendiri adalah terhormat dan nikmat. 5). Para nabi dan rasul, mereka semua tidak meminta upah dari manusia, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat-ayat Al Qur'an.

Berdasarkan uraian di atas bahwa doktrin dan konsep ekonomi yang dikembangkan oleh Sarekat Dagang Islam (SDI) tidak hanya mengakar berdasarkan dalil-dalil yang kuat, baik Al Qur'an dan As-Sunah, tetapi juga cukup aktual dan visioner. Perbagai konsep ekonomi Islam, baik dikembangkan para ulama, ilmuwan dan aktivis mempunyai benang merah,

yaitu: Pertama, doktrin tentang kemandirian ummat. Kedua, adalah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang umumnya berada dalam taraf kemiskinan dan kemelaratan. Bahkan dibenarkan oleh para ilmuwan barat, tetapi konsep yang agak berbeda, yang dalam istilah mereka adalah teori ekonomi politik⁵.

Salah satu pemikir ekonomi Islam kontemporer yang perlu dikemukakan di sini adalah Syed Nawab Haedir Naqvi. Pemikiran Syed Nawab terhadap ekonomi Islam didefinisikan menjadi tiga bagian. Ekonomi sebagai subset sejumlah manusia yang berbasis usaha yang mempunyai prinsip al-adl wal ihsan, yaitu sebagai etika yang akan mengawasi jalannya ekonomi. Dalam kebijakan harus menyokong yang miskin dan yang lemah, yaitu yang mencerminkan kepada keadilan. Peran utama dalam status ekonomi ialah produksi, distribusi dan peraturan, yaitu sebagai status yang mendomikan ekonomi.

Metodologi pemikiran Syed Nawab menyatakan bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai petunjuk dan acuan nilai serta sebagai rujukan dalam menjalankan perekonomian. Dimana hal tersebut sebagai acuan untuk melawan pemikiran kapitalis dalam menjalankan perekonomian. Filsafat ekonomi Islam menurut Nawab, terdapat empat aksioma; yaitu : persatuan, keseimbangan, bebas menentukan keinginan, dan pertanggungjawaban. Maka dalam permasalahan tersebut terdapat beberapa instrument kebijakan untuk mencapai sasaran sistem ekonomi Islam, yaitu: a. Penghapusan riba adalah penghapusan dari semua format penghisapan dan penolakan keseluruhan sistem kapitalistik. b. Zakat adalah sebagai cerminan philosophy penganut paham persamaan. Perubahan lain untuk mencapai keadilan, pendidikan universal, pertumbuhan ekonomi, peningkatan

5. Dalam hal ini, James A. Caporaso dan David P. Levine yang populer disebut Caporaso Levine melakukan pengkajian beberapa kerangka yang sangat penting untuk menjabarkan hubungan antara ekonomi dan politik, termasuk Ekonomi Klasik, Neoklasik, Marxian, Keynesian, negara-terpusat, daya-terpusat, dan keadilan di tengah-tengahnya.

dan generasi ketenaga-kerjaan yang maksimum pada mutu hidup⁶.

Tokoh lain yang tidak biasa diabaikan, yaitu: M. Umer Chapra (1 Februari 1933, Bombay India). Beliau adalah salah satu ekonom kontemporer Muslim yang paling terkenal pada zaman modern ini di timur dan barat. Setelah meraih gelar S2 dari Universitas Karachi pada tahun 1954 dan 1956, dengan gelar B.Com / B.B.A (Bachelor of Business Administration) dan M.Com / MBA (Master of Business Administration), karir akademisnya berada pada tingkat tertinggi ketika meraih gelar doktoratnya di Minnesota, Minneapolis.

Beliau sangat berperan dalam perkembangan ekonomi Islam. Ide-ide cemerlangnya banyak tertuang dalam karangan-karangannya. Pendapat M. Umer Chapra terhadap ekonomi Islam pernah dikatakannya dan didefinisikannya sebagai berikut: Ekonomi Islam didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau

6. Masih banyak pemikir ekonomi Islam kontemporer yang layak dikemukakan di sini, antara lain, yaitu: Abdul Mannan merupakan salah satu sosok pemikir ekonomi Islam yang datang di masa kontemporer ini, yaitu salah seorang yang mendapat gelar Master dan Doktornya di Universitas Michigan, Amerika Serikat. Ia juga salah satu pengajar dan peneliti di universitas-universitas dunia termasuk di Universitas King Abdul Aziz, Jeddah. Perbandingan ekonomi Islam dan ekonomi modern pada pemikiran Abdul Mannan adalah konsumsi dan perilaku konsumen. Monzer al khalil termasuk orang pertama yang mengaktualisasikan analisis penggunaan beberapa institusi Islam (seperti zakat) terhadap agregat ekonomi, seperti simpanan, investasi, konsumsi dan pendapatan. Hal ini dapat di lihat dalam bukunya yang berjudul "ekonomi Islam : sebuah analitik terhadap fungsi sistem ekonomi Islam", dan diterbitkan pada tahun 1978. Jika dikatakan bahwa karyanya itu memiliki awal sebuah "analisis matematika" ekonomi Islam yang saat ini menjadikan kerangka kerja ekonom muslim. Yang paling utama dan terpenting dari pemikiran khalil adalah pandangannya terhadap ekonomi sebagai bagian tertentu dari agama. Juga terdapat Abu A'la Al-Maududi adalah seorang pemikir Islam pada fase ke tiga (1900-1970 H) yang biasa disebut dengan masa modern atau kontemporer. Beliau banyak membicarakan tentang sistem ekonomi yang sekarang terkenal di dunia yaitu perbedaan pada sistem kapitalis, komunis, dan Islam sistem ekonomi Islam dan sendi-sendinya.

tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

Berbagai pemikiran ini juga pernah disinggung oleh Tjokroaminoto memandang bahwa ada tiga hal perintah tentang kedermawanan dalam Islam, yang ketiganya ini masing-masing mempunyai dasar sosialis⁷:

1. Akan membangun rasa ridha mengorbankan diri dan rasa melebihi keperluan diri sendiri
2. Akan membagi kekayaan sama rata di dalam dunia Islam, dengan lantaran menjadikan pemberian zakat sebagai salah satu rukun Islam.
3. Akan menuntun perasaan orang, supaya tidak menganggap kemiskinan itu satu kehinaan, tetapi menganggap kemiskinan itu lebih baik daripada kejahatan. Sekalian orang suci dalam Islam suka jadi miskin, sedang kita punya Nabi yang mulia itu sendiri telah berkata: "kemiskinan itu menjadikan besar hati saya".

Jadi cukup jelas bahwa Islam menyatakan perang dengan kemiskinan, dari berusaha keras membendunginya, serta mengawasi berbagai kemungkinan yang dapat menyebabkannya, guna menyelamatkan aqidah, akhlak dan perbuatan memelihara kehidupan rumah tangga, dan melindungi kesetabdan serta ketentraman masyarakat.

Bekerja merupakan suatu yang utama untuk memerangi kemiskinan, modal pokok untuk mencapai kekayaan, dan faktor dominan dalam menciptakan kemakmuran dunia. Dalam tugas ini, Allah telah memilih manusia untuk mengelola bumi, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah, bahwa hal itu pernah diajarkan oleh Nabi Saleh a.s kepada kaumnya:

7 Sebagaimana yang dikemukakan dalam bukunya: Islam dan Sosialisme. Djakarta: Lembaga Penggalan Dan Penghimpunan Sedjarah Revolusi Indonesia Endang dan Pemsula, 1963.

"Wahai Kaumku ! sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu tuhan, melainkan dia. Dia telah menciptakan kamu dari tanah (liat) dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnu". (Q.S. Hud: 61)

Berdasarkan uraian di atas bahwa doktrin dan konsep ekonomi yang dikembangkan oleh Sarekat Dagang Islam (SDI) tidak hanya mengakar berdasarkan dalil-dalil yang kuat, baik Al Qur'an dan As-Surah, tetapi juga cukup aktual dan visioner.

C. Analisis Penguasaan Pasar

Ada beberapa hal yang menarik apa yang dilakukan oleh Sarekat Dagang Islam (SDI) dalam penguasaan pasar. Pertama, awalnya organisasi yang dibentuk oleh Haji Samanhudi ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang masuknya pedagang asing untuk menguasai ekonomi rakyat pada masa itu dengan tujuan awal untuk menghimpun para pedagang pribumi Muslim (khususnya pedagang batik) agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar Tionghoa.

Kedua, Kebijakan yang sengaja diciptakan oleh pemerintah Hindia-Belanda yang cenderung menguntungkan kelompok Cina dan kemudian menimbulkan perubahan sosial karena timbulnya kesadaran di antara kaum pribumi yang biasa disebut sebagai *Inlanders*. Ketiga, guna memperluas informasi dalam upaya pembentukan organisasi niaga tersebut, diterbitkanlah terlebih dahulu buletin, *Taman Perwata*, yang mampu bertahan selama tiga belas tahun, 1902-1915 M. Keempat, selanjutnya, segera membangun organisasi kerjasama niaga dengan para wirausahawan Cina dengan nama *Kong Sing*.

Kekuatan SI/ SDI dalam ekonomi tidak hanya dalam doktrin dan konsep, tetapi yang sama penting adalah kesesuaian antara konsep dengan kondisi umat. Ada

korelasi dan relevansinya antara doktrin dan konsep dengan kebutuhan dan problem yang dihadapi oleh ummat Islam waktu itu. Pertama, setelah kekuatan Aqidah yang sama penting adalah kekuatan jaringan, misalnya, pada awal berdirinya Sarekat Dagang Islam (SDI) Haji Samanhodi banyak melibatkan menghimpun para pedagang pribumi Muslim (khususnya pedagang batik), bahkan nama gerakannya disebut sebagai "Sarekat Dagang". Sebagaimana awal perjuangan da'wah Rasulullah SAW dibarengi dengan meningkatnya kekuatan ekonomi umat. Bergabungnya para saudagar yang kuat dalam bidang ekonomi seperti 'Utsman bin 'Affan, 'Abdurrahman bin 'Auf, Abu Bakar, Umar bin Khattab dan yang lainnya menjadikan perjuangan Rasulullah SAW semakin cepat pergerakannya.

Juga sebagaimana diketahui bahwa Islam dapat masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan pula. Agama Islam pertama masuk ke Indonesia melalui proses perdagangan, pendidikan dan lain-lain. Tokoh penyebar Islam adalah walisongo antara lain: Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Drajat, Sunan Gresik (Maulana Malik Ibrahim). Thomas Arnold dalam *The Preaching of Islam* mengatakan bahwa kedatangan Islam bukanlah sebagai penakluk seperti halnya bangsa Portugis dan Spanyol.

Jadi dalam konteks ini Sarekat Dagang Islam (SDI) tidak hanya memperkuat basis perjuangannya dengan para saudagar saja, tetapi yang menarik di sini juga mengadakan kerjasama dengan niaga dengan para wirausahawan Cina dengan nama Kong Sing. Artinya, kemampuan menggabungkan kekuatan internal dan eksternal dalam gerakan ekonominya. Adapun guna memperluas informasi dalam upaya pembentukan organisasi niaga (SDI) tersebut, diterbitkanlah terlebih dahulu buletin, *Taman Perwata*, yang mampu bertahan selama tiga belas tahun, 1902-1915 M.

Faktor kedua dari kekuatan SI/ SDI adalah kejelasan yang dihadapi, yaitu: penjajah Belanda dan Cina sebagai kompetitor. Artinya, apa yang dihadapi oleh SDI tidak abstrak atau tidak dalam bayang-bayang, tetapi terkait kondisi riil masyarakatsaat itu, yaitu: diskriminasi dan penindasan kolaborasi antara penjajah Belanda dan Cina. Dalam konteks ini yang lebih ditekankan adalah terkait dengan kepedulian sosial, tepatnya adalah problem dan kebutuhan ummat. Sebagaimana firman Allah SWT:

Artinya: Tabukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan) barang berguna (QS. Al Mauun 1-7)

Rasulullah SAW mengecam umat Islam yang tidak peduli nasib saudara seiman: "Barangsiapa yang tidak peduli urusan kaum Muslimin, Maka Dia bukan golonganku." (Al-Hadits).

Hal ini spiritnya sesuai dengan hadist berikut ini, yang artinya:

Dari Abu Hurairah Radhiallahuanhu, dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam bersabda: Siapa yang membantu menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari sebuah kesulitan di antara berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan salah satu kesulitan di antara berbagai kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hambaNya selama hambaNya itu menolong saudaranya. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Tidaklah sebuah kaum yang berkumpul di

salah satu rumah-rumah Allah (maksudnya masjid, per) dalam rangka membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan niscaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi para malaikat serta Allah sebut-sebut mereka kepada makhluk yang ada di sisiNya. Dan siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya". (HR. Muslim No. 2699, At Tirmidzi No. 1425, Abu Daud No. 1455, 4946, Ibnu Majah No. 225, Ahmad No. 7427, Al Baihaqi No. 1695, 11250, Ibnu 'Asakir No. 696, Al Baghawi No. 130, Ibnu Hibban No. 84)

Jadi, tujuan SDI mengumpulkan para pedagang pribumi muslim untuk menandingi para pedagang China yang pada saat itu memiliki hak lebih luas dan status lebih tinggi dibanding pengusaha pribumi suatu hal yang bisa dimaklumi. Di sisi lain, Kolonial Belanda yang berkuasa pada saat itu selalu membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan pedagang pribumi muslim. Mereka beranggapan bahwa Islam adalah ancaman serius yang harus segera dimusnahkan. Tidak bisa dipahami sebagai suatu sikap yang reaktif (emosional), tetapi merupakan jawaban yang proposional dan realitis, sehingga gerakan SDI tidak hanya dirasakan kehadirannya oleh ulama, ilmuan dan elit, tetapi juga dirasakan masyarakat bawah (*grass-rot*).

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa kekuatan Sarekat Dagang Islam (SDI) tidak hanya dalam kekuatan doktrin dan konsep, tetapi yang sama penting adalah kemampuan membaca kebutuhan dan problem yang dihadapi oleh ummat dalam ekonomi waktu itu. Jadi, keberadaan Sarekat Dagang Islam tidak hanya mampu menggerakkan ulama dan ilmuan serta para elit Jawa, tetapi juga mampu menggerakkan ummat dalam gerakan ekonomi.

Ada hal menarik dari fakta-fakta ini yaitu titik balik sejarah bangsa Indonesia dan kebangkitannya ditandai oleh bersatunya para pengusaha pribumi dalam satu ikatan organisasi. Merupakan fenomena yang bisa menjadi inspirasi bagi perjuangan ummat Islam Indonesia saat ini.

Dan juga terus menyempurnakan ekonomi Islam makro pada tataran nasional dan menggalakkan ekonomi Islam pada tataran yang paling kecil yaitu rumah tangga. Diharapkan baik pemerintah maupun masyarakat tidak lagi berkiblat pada prinsip kapitalis sekuler dalam menjalankan ekonomi, akan tetapi roda perekonomian dapat berjalan sesuai dengan asas Islam, yang berprinsip "saling menguntungkan dan mendahulukan kesejahteraan umat dibanding kesejahteraan individu" Jika ini sungguh-sungguh terjadi, maka dengan izin Allah kebangkitan nasional jilid 2 akan terulang kembali. Kemerdekaan sejati pun dapat diraih, yaitu terbebasnya negara kita dari penjajahan ekonomikapitalisme dan sekutunya. Wallahu A'lam

DAFTAR PUSTAKA

- A.K Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat, 1984.
- Akira Nagazumi, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia, Budi Utomo 1908-1918*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1989.
- Al- Maududi, Abu A'la, *Dasar-dasar Ekonomi dalam Islam*, al-Ma'arif, Bandung, 1980.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fatou-Fatou Kontemporer*, ahli bahasa Asad Yasin. Jakarta : Gemma Insani Press, 1997.
- Amela, *HOS Tjokroaminoto: Hidup dan Perjuangannya*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Azhar, M. *Filsafat Politik (Perbedaan antara Barat dengan Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Chapra, M.Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Gemma Insani Press, Jakarta, 2000
- Chapra, M.Umer, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Shariah Economics and Banking Institute, Jakarta, 2001.
- Efferadi, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, . Cet. I, 1998.
- George McTurnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Cornell University Press, 1952.
- Gonggong, A. *HOS Tjokroaminoto*. Jakarta: Depdikbud Proyek Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, 1985.
- Haedir Naqvi, Syed Nawab. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Pastaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Iskandar, Jos Sutan. *Rekonstruksi PSI dalam visi Rahardjo Tjokraningrat*, Cet. I; Jakarta: Pustaka Nusa Centre, 2002.
- Kartosudirdjo, Sartono. *Peugantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional_Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme Jilid II*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Korver, A. P. E. Van. *Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil*. Jakarta: PT. Grafitipers, 1985.
- Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid, Esai-Esai, Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental*. Cet. I. Bandung: Mizan, 2001.
- M. A. Gani. *Ciri Dasar dan Pola Perjuangan Syarikat Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1984.
- M.C Rickleis, *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1991.
- Munawichiri, Zainul, *Berebut Kiri: Pergulatan Marxisme awal di Indonesia, 1912-1926*. Yogyakarta: LKIS, 2005.
- Mustafa, A., dkk. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 1998.
- Nour, Delliuar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1996.
- Prametyo, Eko. *Islam Kiri - Jalan Menuju Revolusi Sosial*. Insist Press Printing, Yogyakarta: Cet. Ke-2 2004.
- Rickleis, M. C. *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Suwayndi, Takashi. *Zaman Bergolak*. Jakarta: Gramedia, 2004.
- Soo Hek Gie, *Di Bawah Lentera Merah*, Yayasan Benteng Budaya Yogyakarta.
- Sudyo, *Perhimpunan Indonesia Sampai Dengan Lahirnya Sumpah Pemuda*. Cet. I. Jakarta: Bina Aksara, 1989.

Suryanegara, Ahmad Mansur, *Api Sejarah 1*, Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, Cet. VI, 2013.

Tashadi dkk. *Tokoh-Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan*, Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1993.

Tjokroaminoto, O.S. *Islam dan Sosialisme*. Djakarta: Lembaga Penggali dan Penghimpun Sedjarah Revolusi Indonesia Endang dan Pemuda, 1963.

Valina Singka Subekti, *Partai Syarikat Islam Indonesia : Kontestasi Politik hingga Konflik Kekuasaan Elit*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta; Cet ke-23; 2011.

Yusuk, Mundzirin, dkk. *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka, 2006.

IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI BANK SYARIAH (STUDI KASUS DI BANK BTN SYARIAH CABANG MALANG)

Ahmad Muqorobin¹

Fitria Agustina²

ABSTRAK

Munculnya krisis moneter di Indonesia tahun 1997 disebabkan oleh rendahnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Memasuki abad 21, abad globalisasi yang penuh dengan tantangan dan persaingan, maka penerapan prinsip *Good Corporate Governance* telah menjadi suatu kebutuhan serta sebuah kepatuhan dalam pengelolaan perusahaan seperti perbankan terutama perbankan syariah. Penerapan GCG di perbankan syariah dilakukan untuk meningkatkan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah sebagai lembaga kepercayaan dan intermediasi, melindungi kepentingan stakeholders, meningkatkan moral serta meningkatkan nilai-nilai (values) bagi perusahaan. Penerapan prinsip GCG secara sederhana dapat diwujudkan dengan cara peningkatan etos dan budaya kerja yang amarah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada PT Bank Tabungan Negara Syariah cabang Malang dan kendala-kendala yang dihadapi oleh PT Bank Tabungan Negara cabang Malang dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dan cara mengatasinya. Berdasarkan penelitian, diperoleh jawaban penerapan prinsip-prinsip GCG di Bank BTN Syariah cabang Malang dengan mengikuti 5 prinsip GCG. Dalam prinsip transparansi yaitu: adanya kejelasan fungsi pada laporan keuangan, kejelasan informasi produk pada nasabah, serta kejelasan pada manajemen risiko. Prinsip Akuntabilitas diterapkan dalam bentuk pelaksanaan budaya kerja,

1. Dosen Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor

2. Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Darussalam Gontor

laporan audit, serta adanya pembinaan unit kerja. Prinsip responsibilitas yaitu dengan adanya penerapan yang berhubungan terhadap CSR. Prinsip independensi yaitu dengan pengambilan segala keputusan secara obyektif dengan tidak adanya tekanan dari pihak lain. Dan prinsip kewajaran serta keadilan dilaksanakan demi memperhatikan kepentingan stakeholders dengan pemberian informasi yang wajar serta adanya keadilan yang diterapkan dalam pihak internal bank.

Kata Kunci: Implementasi, GCG, Bank Syariah.

A. PENDAHULUAN

Krisis yang melanda Indonesia yang dimulai pada pertengahan 1997 salah satunya diperparah dengan rendahnya penerapan corporate governance. Hal ini ditandai dengan kurang transparannya pengelolaan perusahaan sehingga kontrol publik menjadi sangat lemah dan terkadang menimbulkan konflik kepentingan yang sangat menyimpang dari norma-norma tata kelola perusahaan yang baik.

Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholder khususnya, dan stakeholders pada umumnya dimana berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.³

Tidak bisa dipungkiri, bahwa selama sepuluh tahun terakhir ini, istilah GCG kian populer. Tak hanya sekedar populer saja, istilah tersebut juga ditempatkan di posisi terhormat. Pertama, *Good Corporate Governance* merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Kedua, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan *Good Corporate*

³ Adrian Sotedi, S.H., M.H., *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafika, Ed. 1, Cet. 1, 2011), hlm. 1.

Governance.⁴ Memasuki abad ke-21, tuntutan untuk pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sangat penting untuk dilakukan.⁵

GCG mendapatkan perhatian luas setelah terjadinya berbagai krisis seperti krisis moneter di Indonesia ataupun skandal Amerika Serikat. Dalam arti luas GCG berkaitan dengan para *stakeholders* perusahaan. Di sisi lain *Corporate Social Responsibility* merupakan komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dengan kata lain, GCG dan CSR merupakan wujud nyata hubungan perusahaan dan masyarakat selaku *stakeholders*.

Oleh karena itu, perbankan terutama perbankan syariah harus menerapkan *Good Corporate Governance* untuk tata pengelolaan system perbankan yang baik dan bisa melayani nasabah dengan baik pula dengan etos dan budaya kerja yang amanah dan jamaah. Dalam *Good Corporate Governance* (GCG), terdapat 5 prinsip, yaitu: keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).⁶

B. Pengertian Good Corporate Governance

Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan dalam jangka panjang. *Corporate Governance* merupakan isu baru dalam dunia bisnis. Menurut Cadbury bahwa pengertian GCG adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan.

⁴ Thomas S. Kaihatu, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan: Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*, (Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra, 2006), hlm. 1.

⁵ Nur Hidayati Setyani, *Jurnal Economica: Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Semarang: LP2EI Fakultas Syariah IAIN).

⁶ Abdul Ghofur Anshuri, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Jafidh Mata University Press, 2007), hlm. 180.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) yang beranggotakan beberapa Negara antara lain, Amerika Serikat, Negara-negara Eropa, serta Negara-negara Asia Pasific pada April 1998 telah mengembangkan *The OECD Principles of Corporate Governance*. Prinsip-prinsip corporate governance yang dikembangkan oleh OECD meliputi 5 hal, yaitu:

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham
2. Perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham
3. Peranan Stakeholders yang terkait dengan perusahaan
4. Keterbukaan dan Transparansi
5. Akuntabilitas Dewan Komisaris

C. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Penerapan GCG perlu diterapkan dan didukung oleh 3 pilar yang saling berhubungan, yaitu Negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dalam dunia usaha. Adapun prinsip-prinsip GCG adalah:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Intinya, perusahaan harus meningkatkan kualitas, kuantitas, dan frekuensi dari pelaporan keuangan.⁷
2. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan bersama.
3. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Perusahaan harus mematuhi peraturan dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara

kesinambungan perusahaan dalam jangka waktu panjang.⁸

4. Independensi, yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ tidak saling mendominasi.
5. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemegang saham yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengelolaan perusahaan perlu ditekankan pada kesetaraan, investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan system dari aturan dan hukum yang dipertahankan untuk melindungi hak-haknya.

Adapun beberapa prinsip islam yang mendukung bagi terlaksana GCG adalah prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan bagian dari system syariah. Nilai-nilai itu meliputi :

1. Ibtidiq
Memastikan bahwa pengelolaan Bank Syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Yaitu mengedepankan cara-cara yang halal serta menjauhi cara-cara yang haram.
2. Tabligh
Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk, dan jasa perbankan.
3. Amanah
Menjaga dengan ketat prinsip-prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana.
4. Ta'ibanah
Memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kecermatan, kesantunan dan tanggung jawab.

⁷ Moch. Rizki, *Prinsip-prinsip Good Corporate Governance*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010, p. 73.

⁸ Mufid An Abubillah, *Corporate Governance Perbankan di Indonesia*, Jogjakarta, PT. Bumi Aksara, 2010, p. 73.

D. Implementasi *Good Corporate Governance* di BTN Syariah Cabang Malang

Bagi BTN Syariah sendiri, implementasi GCG bukan hanya sekedar mengikuti peraturan yang berlaku. Tapi merupakan elemen fundamental yang mendukung kinerja usaha dan keberlanjutan Bank BTN Syariah kedepannya.

Dalam proses dan penerapan *Good Corporate Governance* itu harus sesuai dengan peraturan- peraturan tentang tata kelola perusahaan. Jadi, penerapan ini diibaratkan seperti rambu lalu lintas. Apabila etos kerja seorang karyawan baik, disiplin sesuai peraturan, maka penerapan *Good Corporate Governance* berjalan secara baik dan lancar sesuai dengan yang diinginkan.

Bagi Bank BTN Syariah, penerapan- penerapan pada kelima prinsip- prinsip GCG adalah sebagai berikut:

1. *Transparansi*: Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Akuntabilitas*: Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibility*: Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip- prinsip korporasi yang sehat.
4. *Independency* : Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun.
5. *Fairness* : Keadilan dan kewajaran dalam memenuhi hak- hak stakeholder.

Selain menerapkan kelima prinsip- prinsip *Good Corporate Governance* tersebut, Bank BTN Syariah Cabang Malang juga menerapkan 4 pilar- pilar roadmap GCG yang menjadi pendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik. Keempat pilar- pilar

yang menjadi tonggak implementasi GCG BTN Syariah adalah sebagai berikut:

1. *Commitment on Governance*
2. *Governance Structure*
3. *Governance Mechanism*
4. *Governance Outcome*

Pilar-pilar GCG ini adalah petunjuk dalam rangka mengeksekusi strategi pengembangan GCG yang meliputi beberapa tahapan, sebagai berikut:⁹

1. Tahapan Pra Implementasi

Pada tahapan ini terdapat 3 hal yang dilakukan, yaitu:

- a. Mengukuhkan komitmen manajemen.
- b. Membangun dan melengkapi GCG soft structure.
- c. Membangun dan melengkapi GCG infrastructure.

2. Tahapan Implementasi

Pada tahapan ini dilakukan beberapa strategi, yaitu:

- a. *Awareness programs*
- b. Internalisasi dan institusionalisasi
- c. Evaluasi dan *assessment programme*
- d. Pengembangan *software*
- e. Eksternalisasi

3. Tahapan Siklus Implementasi

Monitoring berkelanjutan dan penetapan action plan and feedback pada setiap akhir tahun dengan menggunakan metode plan- Do- Check- Action, menuju sukses jangka panjang.

Sejalan dengan arahan untuk menjalankan fungsi komite audit secara efektif, maka ukuran sukses komite audit yang berhubungan dengan kegiatan organisasi adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen seperti pelayanan, kualitas, dan biaya. Komite audit memiliki wewenang untuk melaksanakan dan mengesahkan penyelidikan terhadap masalah- masalah di dalam ruang lingkup tanggungjawab.

⁹ Laporan Berkelanjutan Bank BTN, p. 14.

Oleh karena itu peran komite audit erat kaitannya dengan *Good Corporate Governance* dan dapat dijadikan tolak ukur sukses bagi suatu perusahaan. Komite audit merupakan pilar penting dalam penerapan GCG, karena komite audit juga berperan dalam evaluasi laporan keuangan.

Suatu tata kelola perusahaan yang baik dapat dilihat dari ketepatan audit. Karena apabila tidak ada ketepatan dalam proses audit maka penerapan *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan bermasalah dan diperlukan suatu evaluasi. Dalam bank BTN syariah Cabang Malang, laporan audit harus dibuat setiap harinya dan setiap satu bulan harus ada laporan audit ke SHAD (Syariah Division).¹⁰

E. PENUTUP

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang menjadi kewenangan Bank BTN Syariah Cabang Malang sudah dikatakan baik. Dengan motto yang menjadi andalan bank BTN Syariah tentang GCG yaitu: "BEKERJA DENGAN HATI GCG SUDAH PASTI". Maka bank BTN pada umumnya dan bank BTN Syariah pada khususnya bertekad menjadi bank kebanggaan keluarga Indonesia dengan praktik GCG terbaik di masa mendatang. Yaitu dengan melaksanakan kelima prinsip GCG dan 4 pilar-pilar roadmap GCG diantaranya adalah: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan.
2. Kendala yang dihadapi oleh Bank BTN Syariah Cabang Malang dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* adalah faktor budaya, yaitu masih adanya

10 Hasil interview dengan Ayuturrahman, Pegawai Bank BTN Syariah cabang Malang, 26 Maret 2014, pukul 09-00.

anggapan bahwasanya penerapan GCG itu adalah hanya sebatas kepatuhan saja. Selain itu faktor dalam penyatuan pemahaman pada karyawan bank BTN syariah tentang pentingnya GCG. Upaya yang dilakukan oleh bank BTN Syariah Cabang Malang adalah dengan menyatukan persepsi atau pemahaman yang sama di setiap karyawan tentang GCG, dan dalam penyatuan pemahaman ini diperlukan proses karena banyaknya perbedaan karakter dalam Sumber Daya Manusia.

Daftar Pustaka

- كيل، جورج. البوصلة الأخلاقية للشركات أدوات مكافحة الفساد وحوكمة الشركات
- Abdullah, Mal An. 2010. *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media
- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Setiani, Nur Hidayati. 2010. "Implementasi Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah di Indonesia" *Jurnal Economika*. LP2EI Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang
- Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Cet 1, Jakarta: Sinar Grafika
- Thomas S. Kaihatu, 2006. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan: Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*, Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra.
- Zarkasyi, Moh. Wahyudin. 2008. *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya*. Cet 1. Bandung: Alfabeta
- Laporan BTN Berkelanjutan 2012
- <http://www.btnsyariahcabangmalang.co.id>